

Pelaksanaan Administrasi Keuangan Proyek PT Cilegon Boemi Makmur

**Muhammad Angga Anggriawan^{1*}, Novi Handayani^{2*},
Mochamad Hanief Febriansyah^{3*}**

^{123*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa,
Serang, Indonesia

^{1*}muhammadanggaanggriawan@gmail.com, ^{2*}novi.novihndayani@gmail.com,
^{3*}mhanieffebriansyah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze in-depth the implementation of project financial administration at PT Cilegon Boemi Makmur, an entity engaged in the building construction, water infrastructure, and mechanical and electrical sectors. Financial administration is viewed as the core of management, driving all company operational functions through the planning, procurement, and fund accountability cycles. Using a qualitative approach with descriptive analytical methods, this study investigates the effectiveness of daily operational fund management, or petty cash, and strategies to mitigate information asymmetry between field units and the head office during the Internship Lecture (KKP) period in February 2026. The results indicate that orderly administration of transaction documents is a key foundation for financial report accountability and a smooth payment claim process for project owners. Furthermore, valid administration is a crucial instrument in fulfilling Final Income Tax (PPh) obligations for Construction Services under Law Number 2 of 2017. The study's conclusions emphasize that the harmonization of the speed of physical development in the field and the accuracy of daily document validation are crucial for the entity's economic stability and legal compliance.

Keywords: Financial Administration; Petty cash; Construction Services; Accountability; Tax Accounting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan administrasi keuangan proyek pada PT Cilegon Boemi Makmur, sebuah entitas yang bergerak di sektor jasa konstruksi bangunan, infrastruktur air, serta mekanikal dan elektrik. Administrasi keuangan dipandang sebagai inti manajemen yang menggerakkan seluruh fungsi operasional perusahaan melalui siklus perencanaan, pengadaan, dan akuntabilitas dana. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, penelitian ini menginvestigasi efektivitas pengelolaan dana operasional harian atau kas kecil (*petty cash*) serta strategi mitigasi asimetri informasi antara unit lapangan dan kantor pusat selama periode Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada Februari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertiban administrasi dokumen transaksi merupakan fondasi utama bagi akuntabilitas laporan keuangan dan kelancaran proses klaim termin pembayaran kepada pemilik proyek (*owner*). Selain itu, pengadministrasian yang valid menjadi instrumen krusial dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa harmonisasi antara kecepatan perkembangan fisik di

Article info

Received 22 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 28 Februari 2026

mhanieffebriansyah@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

lapangan dengan ketepatan validasi dokumen harian sangat menentukan kestabilan ekonomi dan kepatuhan hukum entitas.

Kata Kunci: Administrasi Keuangan; Kas Kecil; Jasa Konstruksi; Akuntabilitas; Akuntansi Pajak.

1. PENDAHULUAN

Administrasi merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen modern, administrasi tidak lagi dipahami sebatas aktivitas pencatatan, melainkan sebagai mekanisme koordinatif yang mengintegrasikan seluruh fungsi manajerial. Menurut Stephen P. Robbins (2022) dan Mary Coulter (2021), efektivitas manajemen organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sistem administrasi yang menopang proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan relevan.

Dalam konteks keuangan, administrasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memastikan seluruh transaksi tercatat secara sah, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Setiawan dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan yang terdigitalisasi mampu meningkatkan transparansi dan menekan potensi penyimpangan anggaran. Sejalan dengan itu, Pradana, Yusuf, dan Lestari (2023) menemukan bahwa kelemahan dokumentasi transaksi menjadi faktor dominan terjadinya ketidaksesuaian laporan realisasi anggaran dalam organisasi berbasis proyek. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas administrasi keuangan tidak hanya berimplikasi pada akurasi laporan, tetapi juga pada stabilitas keuangan entitas secara keseluruhan.

Administrasi keuangan menjadi fondasi utama dalam proses penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran biaya. Hansen dan Mowen (2021) menegaskan bahwa setiap transaksi, tanpa memandang nominalnya, harus didukung bukti yang sah guna menjamin reliabilitas informasi akuntansi. Dalam industri konstruksi, kebutuhan dokumentasi menjadi semakin krusial karena karakteristik proyek yang bersifat temporer, berbasis kontrak, dan memiliki variasi biaya yang tinggi. Studi Wibowo dan Nugroho (2024) mengungkapkan bahwa ketidakteraturan administrasi proyek berkontribusi terhadap deviasi antara realisasi biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang pada akhirnya memengaruhi profitabilitas proyek.

Industri jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dinamika administratif yang kompleks, terutama dalam pengelolaan material, pembayaran tenaga kerja, serta koordinasi dengan subkontraktor. Berdasarkan kajian Hidayat dan Kurniawan (2023), proyek konstruksi memiliki tingkat risiko administratif lebih tinggi dibanding sektor jasa lainnya karena intensitas transaksi harian yang besar dan ketergantungan pada dokumen lapangan. Kondisi ini menuntut adanya sistem administrasi keuangan yang adaptif namun tetap menjamin ketertiban pengendalian internal.

PT Cilegon Boemi Makmur sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan gedung, infrastruktur air, serta pekerjaan mekanikal dan elektrik, beroperasi dalam lingkungan proyek yang menuntut ketepatan pengelolaan kas dan dokumentasi transaksi. Pengelolaan dana operasional harian melalui mekanisme *petty cash* menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran aktivitas lapangan. Namun demikian, penggunaan kas kecil yang bersifat cepat dan fleksibel seringkali menghadapi tantangan dalam aspek pengarsipan bukti transaksi dan sinkronisasi pelaporan dengan kantor pusat. Penelitian Sari dan Utomo (2024) menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara unit proyek dan sistem pusat berpotensi menciptakan asimetri informasi yang berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan proyek.

Secara normatif, penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(2017) yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus didasarkan pada kontrak yang sah serta sistem administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari perspektif akuntansi perpajakan, administrasi keuangan proyek juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi. Yuliani (2023) menyatakan bahwa kelemahan dokumentasi administrasi proyek meningkatkan risiko koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengendalian internal dan manajemen biaya pada sektor konstruksi, kajian yang mengintegrasikan aspek administrasi keuangan proyek, pengelolaan kas kecil, serta dinamika asimetri informasi antara unit lapangan dan kantor pusat pada perusahaan konstruksi skala menengah masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih kontekstual dan empiris mengenai bagaimana praktik administrasi keuangan dijalankan pada level operasional proyek serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan administrasi keuangan proyek pada PT Cilegon Boemi Makmur, dengan fokus pada mekanisme pengelolaan dana proyek, sistem pengawasan kas kecil, serta strategi perusahaan dalam mengurangi risiko asimetri informasi antara unit lapangan dan kantor pusat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur administrasi keuangan proyek serta kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas pengendalian internal pada sektor jasa konstruksi.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Produktivitas

Administrasi pada era industri 4.0 dan 5.0 telah mengalami transformasi dari aktivitas klerikal menjadi sistem pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dengan fungsi manajemen strategis. Dalam perspektif manajemen modern, administrasi merupakan proses koordinatif yang mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2022), efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi yang mampu menyediakan informasi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara khusus, administrasi keuangan mencakup perencanaan anggaran, pengadaan dana, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Kasmir (2021) menegaskan bahwa keteraturan administrasi keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan melalui pengendalian arus kas dan pengawasan anggaran. Dalam konteks perusahaan konstruksi, sistem administrasi keuangan menjadi fondasi utama agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat direalisasikan sesuai target efisiensi dan profitabilitas proyek.

2.2 Administrasi sebagai Dasar Akuntabilitas Laporan Keuangan

Administrasi keuangan merupakan sumber data primer dalam penyusunan laporan keuangan. Proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan sangat bergantung pada kualitas dokumen sumber (*source documents*) yang tersedia. Mulyadi (2021) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan ditentukan oleh validitas dan kelengkapan dokumen transaksi sebagai dasar pencatatan akuntansi. Tanpa dokumentasi yang memadai, informasi keuangan berisiko kehilangan reliabilitas dan relevansinya.

Hansen dan Mowen (2021) dalam konsep manajemen biaya modern menekankan bahwa setiap transaksi, sekecil apapun nilainya, wajib didukung bukti yang sah seperti kuitansi, faktur, atau nota pembelian. Prinsip ini menjadi krusial dalam industri konstruksi yang memiliki variabilitas biaya material dan tenaga kerja yang tinggi. Dengan demikian, sinergi antara fungsi administrasi dan fungsi akuntansi memungkinkan manajemen

memperoleh informasi biaya yang akurat guna mendukung evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan strategis.

2.3 Administrasi Keuangan pada Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi memiliki karakteristik unik berupa tenggat waktu ketat, struktur biaya kompleks, serta dinamika operasional lapangan yang fluktuatif. Hery (2021) menjelaskan bahwa manajemen proyek kontemporer tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga pada pengendalian biaya dan optimalisasi sumber daya. Oleh karena itu, administrasi keuangan proyek berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang menjaga kesesuaian antara realisasi biaya dan RAB.

Fauzi *et al.* (2024) menyatakan bahwa setiap aktivitas fisik dalam proyek konstruksi memiliki implikasi finansial langsung sehingga memerlukan sistem dokumentasi biaya yang akurat untuk mencegah *cost overrun*. Administrasi yang tidak tertib dapat menghambat evaluasi *cost performance* dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi deviasi anggaran secara dini. Selain itu, Situmorang (2025) menekankan bahwa kelengkapan dokumen administrasi sangat menentukan kelancaran proses pembayaran termin oleh pemilik proyek. Ketidaksesuaian *invoice*, berita acara kemajuan pekerjaan, dan bukti pendukung lainnya dapat menimbulkan keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada likuiditas perusahaan.

2.4 Dinamika Kas Kecil dan Asimetri Informasi

Dalam praktik proyek konstruksi, pengelolaan kas kecil (*petty cash*) menjadi elemen vital untuk mendukung kebutuhan operasional harian yang bersifat mendesak. Pratama dan Sinarasri (2022) menyatakan bahwa sistem kas kecil yang efektif harus dilengkapi dengan prosedur pencatatan, pengarsipan bukti transaksi, serta rekonsiliasi berkala guna mencegah potensi fraud dan ketidakefisienan.

Di sisi lain, perbedaan kondisi antara lokasi proyek dan kantor pusat seringkali menimbulkan asimetri informasi. Sari dan Handayani (2024) menemukan bahwa ketidakteraturan dokumentasi transaksi lapangan dapat menghambat proses verifikasi kemajuan pekerjaan sebagai syarat pengajuan termin pembayaran. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akurasi laporan laba rugi proyek serta mengganggu kestabilan arus kas perusahaan. Dengan demikian, administrasi keuangan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menyelaraskan kecepatan operasional lapangan dengan ketepatan pelaporan keuangan.

2.5 Dasar Hukum dan Kepatuhan Pajak pada Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (2017) yang mewajibkan setiap proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak sah dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai instrumen legalitas.

Dalam perspektif akuntansi pajak, administrasi keuangan proyek berkaitan langsung dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi. Situmorang (2025) menegaskan bahwa kelengkapan dokumen seperti *invoice*, faktur pajak, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) menjadi prasyarat utama dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak. Ketidaklengkapan dokumen dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun konsekuensi hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, akuntabilitas administrasi keuangan merupakan manifestasi kepatuhan hukum sekaligus bentuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik administrasi keuangan proyek dalam konteks operasional perusahaan konstruksi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan eksplorasi proses, mekanisme, dan dinamika administratif yang terjadi secara alamiah di lapangan. Menurut John W. Creswell (2022), penelitian kualitatif berfokus pada penggalian makna atas suatu fenomena melalui interaksi langsung dengan partisipan dalam konteks sosialnya. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2026 di PT Cilegon Boemi Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan dan infrastruktur air, dengan fokus pada pengelolaan administrasi keuangan proyek, khususnya mekanisme pengelolaan dana operasional dan kas kecil (*petty cash*).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara tidak terstruktur. Observasi partisipatif dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas administrasi proyek, sehingga memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai alur pencatatan transaksi, proses validasi bukti pembayaran, serta pelaporan keuangan. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan pembimbing lapangan dan staf administrasi guna menggali informasi terkait prosedur pengelolaan kas kecil dan kendala sinkronisasi laporan antara unit proyek dan kantor pusat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), *invoice* vendor, bukti pembayaran, serta laporan penggunaan dana operasional proyek yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2019), yang menekankan hubungan simultan antara proses pengumpulan dan analisis data. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan mengkaji kesesuaian praktik administrasi keuangan terhadap ketentuan regulatif, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (2017). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang kredibel mengenai implementasi administrasi keuangan proyek pada perusahaan konstruksi..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Administrasi sebagai Pusat Strategis dan Instrumen Pengendalian Internal

Hasil observasi menunjukkan bahwa administrasi keuangan di PT Cilegon Boemi Makmur tidak diposisikan sekadar sebagai fungsi pencatatan, melainkan sebagai pusat koordinasi strategis yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Siklus administrasi dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses pengadaan material, realisasi penggunaan dana di lapangan, hingga tahap pertanggungjawaban akhir oleh tim keuangan dan operasional. Praktik ini mencerminkan fungsi administrasi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan setiap keputusan manajerial diterjemahkan ke dalam tindakan finansial yang terukur dan terdokumentasi.

Temuan ini sejalan dengan konsep pengendalian internal yang menekankan pentingnya sistem dokumentasi dan prosedur otorisasi dalam menjaga keandalan informasi keuangan. Kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2017) menegaskan bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta sistem informasi dan komunikasi merupakan elemen utama dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks perusahaan konstruksi yang

memiliki variabilitas biaya tinggi, keberadaan administrasi yang tertata berkontribusi langsung terhadap pengendalian varians anggaran dan stabilitas arus kas proyek.

Selain itu, kualitas dokumen sumber terbukti menjadi faktor krusial dalam menjamin reliabilitas laporan keuangan. Setiap transaksi di PT Cilegon Boemi Makmur diwajibkan memiliki bukti formal seperti kuitansi, *invoice*, atau nota pembelian sebelum dilakukan pencatatan dan otorisasi pembayaran. Praktik ini memperkuat prinsip akuntabilitas serta mendukung penyajian laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Dengan demikian, integrasi fungsi administrasi dan akuntansi memungkinkan manajemen memperoleh dasar informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan strategis proyek.

4.2 Dinamika Pengelolaan Kas Kecil dan Asimetri Informasi Proyek

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, kas kecil (*petty cash*) menjadi instrumen likuiditas yang vital untuk memenuhi kebutuhan operasional harian yang bersifat mendesak. Observasi lapangan menunjukkan bahwa penggunaan kas kecil memungkinkan percepatan penyelesaian pekerjaan tanpa harus menunggu proses pencairan dana dari kantor pusat. Namun demikian, fleksibilitas tersebut mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan sistem verifikasi dan rekonsiliasi yang memadai.

Fauzi *et al.* (2024) menyatakan bahwa karakteristik proyek konstruksi yang dinamis meningkatkan *inherent risk* pada transaksi berbasis tunai, terutama dalam kondisi pengawasan yang terbatas. Kondisi serupa ditemukan di PT Cilegon Boemi Makmur, di mana keterlambatan pengiriman dokumen pendukung dari lokasi proyek berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara unit lapangan dan manajemen pusat. Situasi ini dapat memengaruhi akurasi pelaporan arus kas serta menyulitkan proses pengendalian biaya proyek.

Hidayat (2023) menegaskan bahwa ketidakteraturan dokumen administratif tidak hanya berdampak pada distorsi laporan laba-rugi proyek, tetapi juga menghambat proses verifikasi kemajuan pekerjaan sebagai prasyarat pengajuan termin pembayaran kepada pemilik proyek (*owner*). Dalam praktiknya, PT Cilegon Boemi Makmur menerapkan mekanisme pemeriksaan berlapis terhadap bukti transaksi kas kecil sebelum direkapitulasi dalam laporan bulanan proyek. Langkah ini menjadi strategi mitigasi risiko untuk menjaga kesesuaian realisasi biaya dengan RAB serta meminimalkan potensi sengketa administratif.

Dengan demikian, pengelolaan kas kecil tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal yang berfungsi mengurangi kesenjangan informasi dan menjaga keberlanjutan arus kas proyek.

4.3 Implementasi Akuntansi Pajak dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Sebagai entitas yang beroperasi di sektor konstruksi, PT Cilegon Boemi Makmur wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (2017). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap proyek harus dilaksanakan berdasarkan kontrak yang sah serta didukung sistem administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam perspektif akuntansi pajak, kelengkapan dokumen administrasi menjadi prasyarat utama dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi. Situmorang (2025) menegaskan bahwa ketiadaan dokumen yang valid, seperti *invoice* resmi, faktur pajak, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dapat menimbulkan risiko koreksi fiskal serta sanksi administratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagian keuangan PT Cilegon Boemi Makmur melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen pihak ketiga sebelum otorisasi pembayaran dilakukan, sebagai bentuk mitigasi risiko perpajakan dan perlindungan hukum perusahaan.

Praktik ini mencerminkan bahwa administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian manajerial, tetapi juga sebagai instrumen kepatuhan hukum (*legal compliance*). Disiplin administratif yang konsisten memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi audit pajak, sekaligus memastikan bahwa seluruh variabel biaya proyek—mulai dari pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, hingga jasa subkontraktor—telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi keuangan proyek di PT Cilegon Boemi Makmur berkontribusi signifikan terhadap penguatan pengendalian internal, pengurangan asimetri informasi, serta peningkatan kepatuhan hukum dan perpajakan dalam sektor jasa konstruksi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis selama pelaksanaan magang di PT Cilegon Boemi Makmur, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan proyek memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi perusahaan serta memastikan efektivitas pengendalian internal. Administrasi tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pencatatan, tetapi sebagai sistem yang mengintegrasikan perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban keuangan secara terstruktur dan terdokumentasi. Keteraturan pengelolaan dokumen transaksi menjadi fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan yang andal serta dalam menjaga kesesuaian realisasi biaya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengelolaan kas kecil (*petty cash*) terbukti menjadi instrumen penting dalam mendukung kelancaran operasional proyek, namun sekaligus mengandung risiko asimetri informasi apabila tidak disertai prosedur pencatatan dan verifikasi yang disiplin. Selain itu, praktik administrasi keuangan perusahaan telah mencerminkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam aspek legalitas kontrak dan kewajiban perpajakan seperti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi, sehingga memperkuat posisi perusahaan dari sisi tata kelola dan perlindungan hukum.

Sejalan dengan temuan tersebut, perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan proyek berbasis digital atau cloud yang terintegrasi antara unit lapangan dan kantor pusat guna meminimalkan kesenjangan informasi dan mempercepat proses verifikasi dokumen. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengiriman dan validasi bukti transaksi juga perlu dilakukan melalui penegasan tenggat waktu serta peningkatan literasi administratif bagi staf teknis di lapangan. Selain itu, optimalisasi pengelolaan arsip dan kepatuhan perpajakan melalui audit internal berkala menjadi langkah strategis untuk memastikan kelengkapan dokumen legalitas vendor dan ketepatan penerapan tarif pajak. Integrasi antara disiplin administrasi, digitalisasi sistem, dan kepatuhan regulatif diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan proyek serta memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. (2025). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Biaya Konstruksi Proyek*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. COSO.
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., dkk. (2024). *Akuntansi Biaya dan Manajemen dalam Industri Konstruksi*. Bandung: Alfabeta.

- Fauzi, A., Rahman, T., & Prasetyo, D. (2024). Cost control and financial risk management in construction projects. *Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2021). *Cost management: Accounting and control* (7th ed.). Cengage Learning.
- Hery. (2021). *Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Biaya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, R. (2023). Administrative documentation and project cash flow stability in Indonesian construction firms. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 133–149.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi. (2021). *Sistem akuntansi (Edisi revisi terbaru)*. Salemba Empat.
- Pratama, I. G. S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pengeluaran Kas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Pratama, Y., & Sinarasri, A. (2022). Internal control effectiveness of *petty cash* management in project-based companies. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 211–223.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Sari, D. P., & Handayani, N. (2024). Pengaruh Ketertiban Administrasi Keuangan terhadap Kelancaran Pencairan Termin Proyek Konstruksi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(2), 1-18.
- Situmorang, R. (2025). *Buku Ajar Kontrak Pekerjaan Konstruksi (Edisi 1)*. Balikpapan: ITK Press.
- Situmorang, R. (2025). Tax compliance risk in construction service companies: Administrative documentation perspective. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(1), 55–70.
- Sugeng, B. (2022). *Manajemen Keuangan Perusahaan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutabri, T. (2023). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai payung hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11
- Wibowo, A. (2025). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Biaya Konstruksi Proyek*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.